PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Senin Tanggal: 05 Juni 2017 Halaman: 13

Pajak Belum Terbayar Masih Rp2,6 Miliar

YOGYA, TRIBUN - Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta masih memiliki potensi pendapatan yang tak tertagih atau kurang bayar senilai Rp2,06 miliar. Pansus akan kembali menjadwalkan klarifikasi ulang dan dilanjutkan dengan rapat internal terkait hal ini, Senin (5/6) hari ini.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan LHP BPK DIY, DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri menjelaskan, pihaknya telah melakukan klarifikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat pada Rabu (31/5) lalu. Hasilnya, BPKAD menyatakan telah menagih atau terbayarkan Rp1,51 miliar dari DIM senilai Rp3,58. "Jadi masih ada angka sebesar Rp2,6 miliar yang masih dalam proses penagihan," ujar Nasrul, akhir pekan lalu.

Menurut Nasrul, beberapa item yang masih dalam proses penagihan dalam

● ke halaman 14

Pajak Belum Terbayar Masih

● Sambungan Hal 13

rincian umum di antaranya adalah temuan terkait retribusi sampah telah dilaksanakan rekomendasi dengan penyetoran ke kas daerah semuanya, MoU dengan PLN dalam proses dikerjakan. Draf MoU telah disusun.

Kemudian, tagihan piutang pajak reklame sebagian sudah dibayarkan, tagihan pajak hotel sebagian telah dibayarkan, piutang pajak Hotel Saphir masih macet, dan tagihan retribusi kios tutup sebagian telah dibayarkan.

Meski telah menerima klarifikasi, pihak Pansus tetap meminta piutang pajak dituntaskan. Menurut Nasrul, jika jelas tidak tertagih, maka harus ada kebijakan nyata, seperti segera bentuk tim juru sita atau eksekusi Perwal tentang Penghapusan Piutang Pajak/Retribusi. Termasuk, penghapusan piutang.

Dia mencontohkan, yang harus segera dihapus adalah piutang retribusi sampah tahun 1995 yang tidak mungkin ditagih. Namun, di neraca keuangan selalu masih muncul setiap tahun. "Prinsipnya piutang jangan sampai tercatat lagi dalam neraca keuangan," jelasnya.

Pihaknya pun mengagendakan rapat klarifikasi ulang bersama BPKAD dilanjutkan rapat internal pansus guna menyusun rekomendasi. Pelaksanaannya adalah Senin (5/6) hari ini.

Perlu diketahui, sebelumnya ada 12 item yang berada dalam daftar inventaris masalah (DIM) lanjutan Pansus LHP BPK tahun 2016. Beberapa diantaranya adalah wajib pajak hotel tak menyetorkan pajak tahun 2016 senilai Rp474,6 juta. Kemudian, pendapatan reklame dari reklame yang tak berizin dan habis masa izinnya yang berpotensi tidak dapat direalisasikan senilai Rp953 juta.

Selain itu, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang belum diterbitkan pada wajib pajak BPHTB sebesar Rp145 juta, ketidakjelasan wajib pajak (WP) hotel yang berpiutang Rp590 juta, dan belum terselesaikannya pajak Hotel Saphir Rp493,8 juta.

Item lainnya, yakni kios los tutup dan memiliki tunggakan atau kekurangan bayar senilai Rp36,1 juta, piutang retribusi pasar sampai dengan November sebesar Rp493,6 juta, dan bunga kekurangan pembayaran retribusi sebesar Rp26,8 juta. Serta, retribusi sampah kurang bayar senilai Rp363,2 juta.

Kepala BPKAD Kota Yogyakarta, Kadri Renggono mengatakan, telah menindaklanjuti rekomendasi BPK. Pihaknya tetap berupaya melakukan penagihan secara berkala pada beberapa item yang memang belum tertagih.

Pihaknya pun sudah layangkan surat tagihan terkait dengan DIM tersebut. Memang, ada yang sudah membayar, ada yang belum membayar tapi sudah berkomitmen untuk membayar. Sementara, opsi lain berupa penyitaan aset, diakuinya tak bisa dilakukan karena Pemkot belum memiliki tim juru sita.

"Terkait penghapusan piutang yang sudah diatur dalam Perwal 19/2015, masih membutuhkan kajian yang mendalam," ujarnya. **(ais)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005